

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

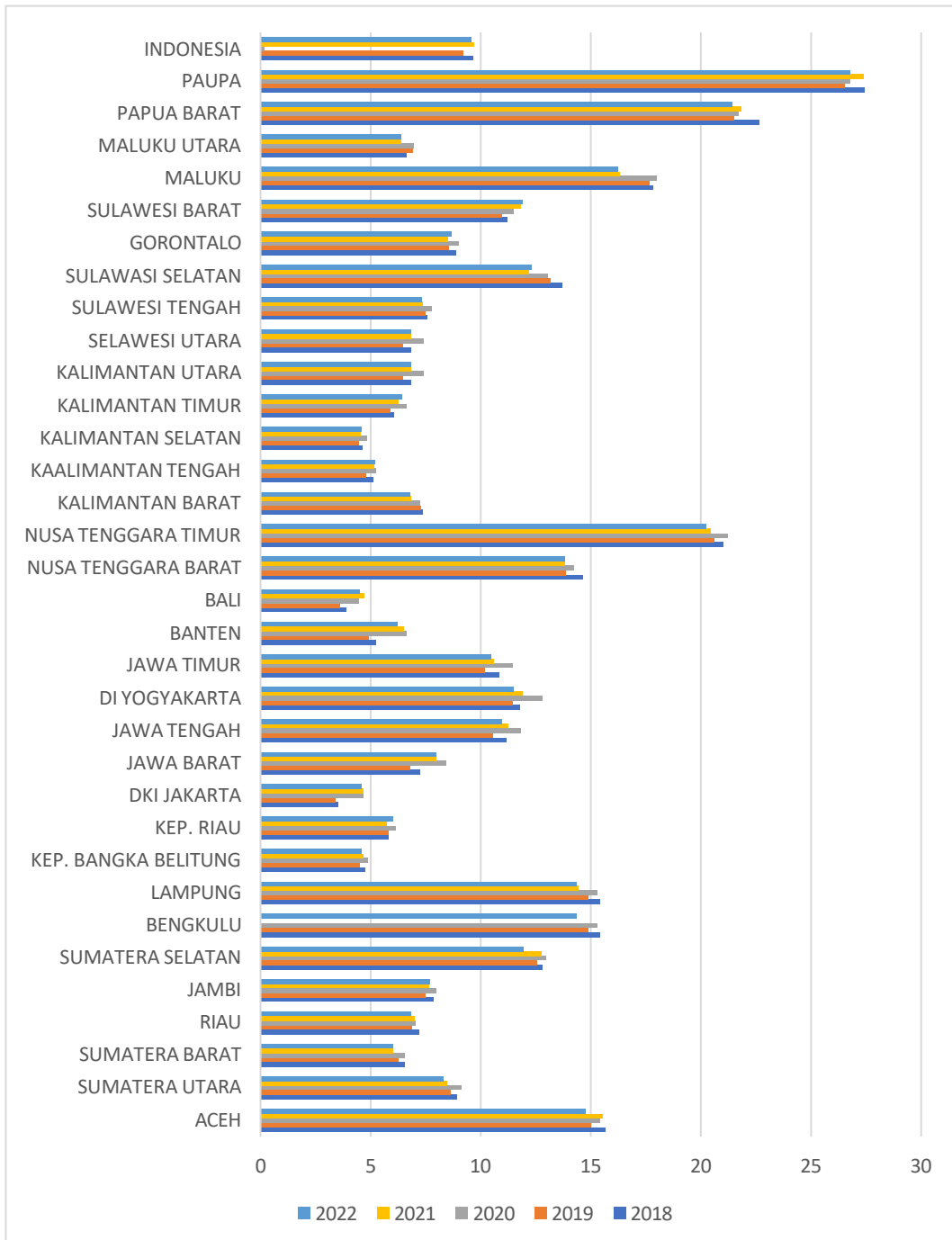
Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty). Lingkaran kemiskinan yaitu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu kondisi dimana suatu negara akan terlihat miskin karena banyak yang mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat pembangunan yang baik. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) dan menyebabkan rendahnya produktifitas. Dengan rendahnya produktifitas maka mengakibatkan rendahnya pendapatan yang akan diterima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya investasi dan tabungan, baik investasi manusia maupun investasi modal. Rendahnya investasi mengakibatkan rendahnya akumulasi modal sehingga dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang rendah sedangkan, kekurangan modal akan menyebabkan adanya keterbelakangan dan seterusnya (Farhan & Sugianto 2022).

Penyebab terjadinya kemiskinan rumah tangga adalah penghasilan yang mereka dapatkan rendah. karakteristik masyarakat miskin adalah keluarga yang mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak. Indikator utama untuk mengetahui suatu keluarga termasuk miskin dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota keluarga. Namun pendapat tersebut tergantung dalam setiap kondisi,

kemiskinan identik dengan negara berkembang. Secara umum negara berkembang memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu tingkat pendapatan nasional yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan stagnan (Syahri & Gustiara 2020).

Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. kemiskinan menimbulkan kesenjangan sosial serta ketidakadilan bagi orang miskin yang melakukan kegiatan pendidikan yang tidak mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan yang kurang berkualitas, kemiskinan banyak terdapat pada daerah pedalaman serta terisolir yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin dipedalaman disebabkan karena ketertinggalan dari berbagai aspek seperti, mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mendapat pengobatan dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan yaitu permasalahan yang kompleks dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor yang disebabkan diri sendiri, keturunan, dan adajuga dari lingkungan hidup dan pemerintah (Annisa, 2022).

Gambar 1.1 Jumlah presentase penduduk miskin Indonesia



Sumber BPS indonesia (2023)

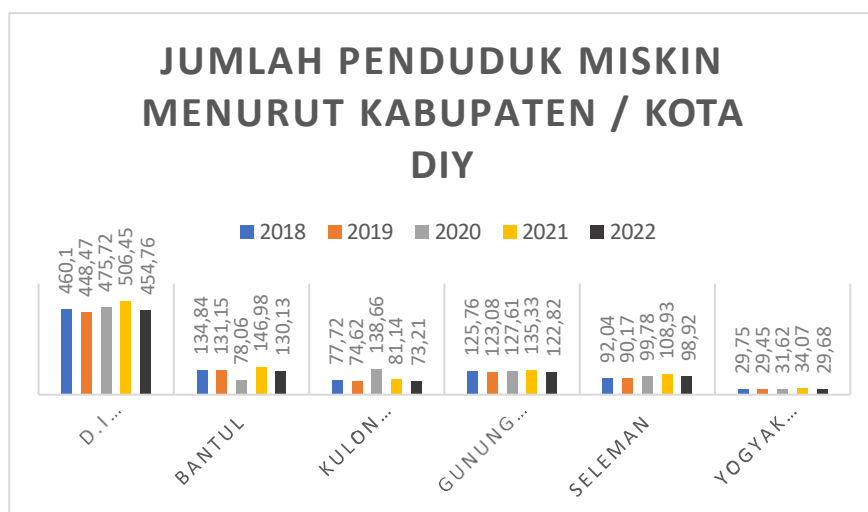
Berdasarkan gambar 1.1 diatas, bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,97 persen dibandingkan tahun

2019. Berdasarkan stastistik terlihat bahwa angka kemiskinan tertinggi diseluruh provinsi Indonesia adalah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang mencapai diatas 20%. Dan diikuti oleh Maluku, Gorontalo, Bengkulu dan Aceh yang mencapai diatas 15%. Jika dilihat dari presentase penduduk miskin di Indonesia yang tidak mencapai dalam 5% pada kemiskinan adalah Bali, kep Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan (BPS, 2023).

Permasalahan ketimpangan pembangunan yang mengakibatkan krtimpangan pendapatan dan kemiskinan antar provinsi di Indonesia sangat dirasakan hingga saat ini, terutama pada pulau jawa dan pulau-pulau diluar pulau Jawa. ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi memberi dampak terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara pulau jawa atau wilayah dimasa datang (Rahmadi & Parmadi, 2019). Berikut adalah beberapa data jumlah penduduk miskin pada provinsi Yogyakarta.

Gambar 1.2

Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota (ribuan)



Sumber BPS.Yogyakarta (2023)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Yogyakarta pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 506,45 kenaikan tersebut terjadi akibat adanya Covid-19. Sedangkan tingkat kemiskinan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 448,47. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa provinsi Yogyakarta masih mengalami tingkat ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah usaha yang dapat dikerjakan guna meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Kenyataannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat maka permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan.

Menurut Izzati (2021), pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat memperbesar perbedaan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya. Selain pertumbuhan ekonomi, kemampuan pengelola keuangan daerah oleh pemerintah daerah juga merupakan salah satu determinan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi atau desentralisasi penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Menurut Purnamasari dalam Todaro (2017), tujuan utama pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya, seharusnya

pembangunan ekonomi bisa mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Besarnya tingkat kesempatan kerja untuk masyarakat dapat memberikan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh sebab itu pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk peningkatan kemakmuran secara adil dan menyeluruh.

Tabel 1.1 PDRB menurut lapangan usaha

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta)		
Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2018	129 818 357,90	98 024 014,30
2019	141 047 688,00	104 485 458,76
2020	138 306 833,26	101 683 520,17
2021	149 369 169,14	107 308 555,43
2022	165 690 209,94	112 898 323,17

Sumber BPS Yogyakarta (2023)

Berdasarkan tabel diatas 1.1 pertumbuhan ekonomi Yogyakarta pada tahun 2018 harga berlaku sebesar 129 818 357,90 dan harga konstan sebesar 98 024 014,30, tahun 2019 harga berlaku sebesar 141 047 688,00 dan harga konstan sebesar 104 485 458,76, tahun 2020 harga berlaku sebesar 138 306 833,26 sedangkan harga konstan sebesar 101 683 520,17, tahun 2021 sebesar 149 369 169,14 dan harga konstan sebesar 107 308 555,43 dan pada tahun 2022 harga berlaku 165 690 209,94 dan harga konstan 112 898 323,17.

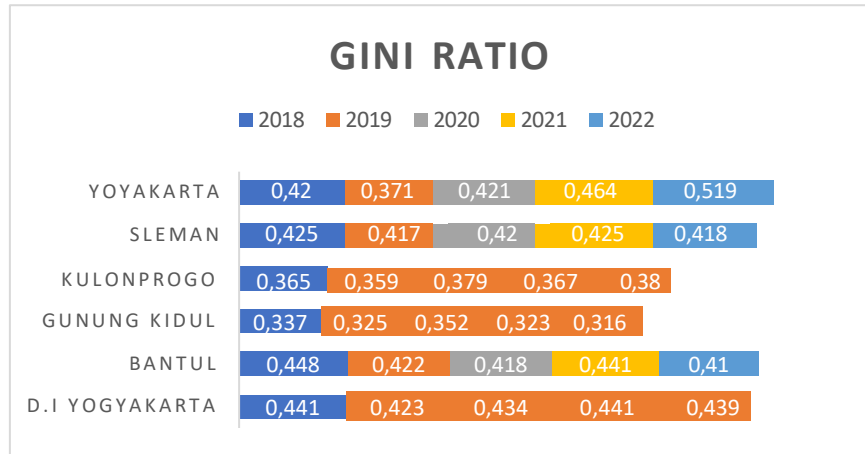
Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi isu utama global, terdapat minat yang besar pada apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menguranginya. Meski belum terdapat bukti yang konklusif, banyak ahli yang mengatakan bahwa salah satu alat penting yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yaitu dengan cara melalui pengeluaran pemerintah. Namun, terdapat perdebatan tentang pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Beberapa ekonom percaya bahwa jenis pengeluaran tertentu yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Alamanda, 2020).

Perhitungan ketimpangan pendapatan yang populer digunakan oleh para ekonom adalah indeks rasio Gini, karena dengan perhitungan ini dapat menjelaskan hubungan antar kelompok penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi dengan penduduk lainnya.

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan ialah sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat baik dinegara maju maupun negara berkembang. perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan untuk mengatasinya yang dipengaruhi oleh luasnya wilayah dan jumlah penduduk. Berikut dilampirkan gini ratio menurut kabupaten atau kota Yogyakarta tahun 2018 – 2022.

Gambar 1.3

Gini ratio menurut kabupaten/kota



Sumber BPS Yogyakarta (2023)

Pada gambar 1.3 diatas terlihat gini ratio di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 0,441, tahun 2019 menurun menjadi 0,423, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,434, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,441, dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,439.

Adanya permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan terdapat proses yang salah dalam pembangunan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau bagaimana peningkatan perekonomian suatu wilayah apabila perekonomian itu berjalan dengan baik, maka terdapat hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat. Serta bentuk dari peningkatan ekonomi tercermin dari pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDRB tidak mampu memecahkan permasalahan mendasar dinegara berkembang, walaupun

target pertumbuhan ekonomi pertahunnya telah tercapai, maka dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan (Wicaksono, 2018).

Namun ketimpangan pendapatan mempunyai dua dampak terhadap pembangunan perekonomian yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari ketimpangan yaitu perekonomian yang tidak efisien, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan dilihat tidak adil. Dampak positifnya adalah mendorong atau merangsang daerah atau wilayah untuk melakukan persaingan dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang sangat kompleks dan merupakan PR untuk pemerintah daerah atau pusat. Oleh sebab itu menjadi sangat menarik agar mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan, dan bagaimana pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan suatu ukuran tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan diukur angka usia harapan hidup, dimensi pendidikan diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah dan

dimensi daya beli yang memiliki standar hidup layak diukur dari paritas daya beli (UNDP,2004).

Tabel 1.2.

IPM Provinsi Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota 2014-2022

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulonprogo	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71	75,46
Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69
Gunung Kidul	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16	70,96
Seleman	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00	84,31
Yogyakarta	83,78	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69

Sumber : BPS Yogyakarta (2023)

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa Kota Yogyakarta peringkat tertinggi sementara Gunung Kidul menempati peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia Provinsi Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berhasil meningkatkan mutu modal manusianya dengan baik dalam hal kesehatan, pendidikan maupun pendapatan masyarakat yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia.

Pada penelitian Arifudin et al., (2023) dengan Judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Pangkaje Dan Kepulauan Periode 2011 - 2010. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan Expost Facto. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data

sekunder kuantitatif pada rentang waktu 2011 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi variabel independen menjelaskan variasi dependen di Kabupaten Pangkep sebesar 95,2% dan sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model sebesar 4,8%. Dan pada saat dilakukan uji secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen maka mendapatkan hasil nilai signifikan, maka disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada penelitian Maskur et al., (2023) dengan judul Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017 – 2021. Pada penelitian tersebut terdapat 24 Provinsi di Indonesia yang menjadi obyek penelitian dengan periode pengamatan yakni selama 5 Tahun (2017-2021). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia, variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia, dan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.

Pada penelitian (Fadila & Marwan, 2020) dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2018. Menunjukkan bahwa pada variabel indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pada penelitian Aini & Nugroho (2023) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pada variabel pengangguran terdapat pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dan pada di uji secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas dan terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu serta terdapat perbedaan tempat lokasi penelotain, variabel penelitian, dan tahun penelitian mengenai kemiskinan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN IPM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2014-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan peneliti kedepannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi dari penelitian adalah dimana penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah teori yang sudah ada sehingga diharapkan bisa menjadi bahan keputusan ekonomi serta berguna bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Manfaat Kebijakan

Adapun manfaat kebijakan dalam penelitian ini ialah dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak ketiga baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas. Untuk memberikan arahan dalam pengembangan dan penyusunan program-program dalam kebijakan.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab dan terdapat beberapa sub bab dengan masing – masing penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

1.5.2 BAB II LANDASAN TEORI

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang relevan mengenai variabel penelitian tinjauan pustaka yang relevan, dan kerangka berfikir.

1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, definisi operasional variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data. Pada bab ini berisi sebagai

penjelasan mengenai prosedur penelitian, yang dimulai dari pengumpulan data sampai analisis data.

1.5.4 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data, hasil pengujian, pengelolaan data. Kemudian membahas mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini.

1.5.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sub bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil temuan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan merupakan rangkaian akhir dari penulis.